



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMANHUDI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 142236

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.479.500.000**

1. Tanah Seluas 10.940 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 42.500.000
2. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
4. Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/149 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 870.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **363.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000



5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
20.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.050.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 102.153.769

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.959.203.769

III. HUTANG Rp. 1.318.584.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 640.619.769

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.